

**PENGARUH VISI-MISI, NILAI IDEOLOGI PARTAI, DAN FIGUR  
TERHADAP PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILUKADA  
KABUPATEN BUTON TAHUN 2017  
(Studi di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton)**

**Oleh: Nur Agustina, La Ode Monto Bauto, Ambo Upe**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh visi misi pasangan calon terhadap perilaku pemilih dalam Pemilukada di Kelurahan Pasarwajo; 2) Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh nilai ideologis partai terhadap perilaku pemilih dalam Pemilukada di Kelurahan Pasarwajo; 3) Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh figur terhadap perilaku pemilih dalam Pemilukada di Kelurahan Pasarwajo. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik kuesioner dan dokumen. Untuk teknik penentuan informan menggunakan teknik *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode analisis *multiple regression* dengan melakukan uji t dan uji F untuk mengetahui keabsahan suatu data yang diolah menggunakan program SPSS for Windows versi 16.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga hipotesis yang diuji, untuk visi-misi dan nilai ideologi partai tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pemilih di Kelurahan Pasarwajo. Sedangkan untuk figur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pemilih di Kelurahan Pasarwajo.

**Kata Kunci:** Pemilukada, Perilaku Pemilih, Visi-Misi, Ideologi, Figur.

---

**PENDAHULUAN**

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) langsung merupakan fenomena politik yang tidak ada habisnya untuk ditinjau dan dikaji, karena hal itu merupakan bagian dari manifestasi demokrasi yang dianut oleh sistem negara Indonesia. Bukan hanya politikus saja yang bisa mengkaji persoalan ini, bahkan ibu-ibu rumah tangga pun tertarik juga untuk sekedar membicarakan politik dalam kelompok arisan mereka. Tidak ada larangan bagi masyarakat untuk terlibat dalam fenomena politik ini, terlebih pada Pilkada, dikarenakan negara Indonesia berdiri di atas demokrasi yang menurut Pradhanawati (2005), secara umum gelombang demokratisasi di Indonesia setelah memasuki era reformasi nampak mulai mengalami kemajuan dengan terdapatnya tanda-tanda yaitu adanya kebebasan mengemukakan pendapat, pembatasan atas kekuasaan, pemilihan umum serta pemilihan jabatan-jabatan publik yang kompetitif termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah langsung.

Adanya Pilkada langsung merupakan manifestasi dari demokrasi yang sesungguhnya, karena kedaulatan sudah sepenuhnya kembali ke tangan rakyat yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan akhirnya rakyat bebas untuk menjatuhkan pilihan sesuai dengan kehendak hatinya. Dalam konteks ini (Upe, 2008), negara memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat dan martabat rakyat daerah.

Masyarakat daerah yang selama ini hanya sebagai penonton proses politik pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh anggota DPRD (parlementer), kini masyarakat menjadi pelaku atau *voters* (pemilih) yang akan menentukan terpilihnya Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan dalam Pilkada. Hal ini kemudian memberikan pemahaman bahwa demokrasi memberi kesempatan yang sama bagi setiap individu maupun sekelompok orang untuk menjadi kepala daerah maupun memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah tanpa menghiraukan latar belakang partai maupun non partai, ekonomi, etnis, agama, sipil, militer dan lain sebagainya. Dengan adanya pemahaman seperti ini, kemudian menimbulkan adanya keaneragaman fenomena Pilkada dari berbagai daerah yang syarat akan persoalan. Hal ini sangat menarik untuk dikaji terlebih mengenai preferensi pemilih yang merupakan bentuk dari partisipasi politik, menurut (Surbakti, 1992) merupakan kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta dalam menentukan pimpinan pemerintahan. Partisipasi politik tersebut didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh warga negara biasa.

Dalam beberapa penelitian terbaru oleh mahasiswa di universitas yang ada di Indonesia, mengungkapkan ada banyak hal yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu: Faktor pertama, polemik calon tunggal pada Pilkada serentak 2015 minim partisipasi, karena beberapa warga sengaja tidak memilih dengan alasan calon figur yang ada tidak cocok dengan hati nuraninya, sebagian merasa tidak adanya kompetisi dalam Pilkada. Faktor kedua, pemilih memilih karena dilihat dari keterkaitan seseorang dengan partai politik, orientasi seseorang terhadap isu-isu dan orientasi seseorang terhadap kandidat, memilih untuk tujuan diri sendiri dengan beberapa alternatif mana yang maksimal baginya, pemilih yang lebih melihat sosok figur dari kandidat calon kepala daerah, meski diberi barang berupa kebutuhan pokok atau dalam bentuk apapun, tidak mempengaruhi pemilih. Faktor ketiga, masyarakat cenderung tergolong pemilih tradisional pada saat pilkudara, karena dengan pemikiran mereka yang sederhana dan sebagian yang memandang kesamaan agama, asal-usul, sosial-budaya bahkan paham dan lainnya, menjadi penyebab mereka memilih pasangan calon yang menurut mereka berasal dari tempat yang sama, agama yang sama, bahkan memiliki budaya yang sama (Dhesinta, 2016; Mopeng, 2016; Mulyani, 2017).

Pilkada atau disebut pula Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin di daerahnya. Pilkada itu dilakukan secara langsung oleh penduduk yang memenuhi syarat di daerah dimana ia tercatat berdomisili. Pilkada untuk memilih Kepala Daerah: Gubernur (provinsi), Bupati (kabupaten) dan Walikota (kota), dilakukan satu paket bersama dengan para wakil kepala daerah. Pilkada serentak nasional telah diselenggarakan pertama kalinya di Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015,

kemudian Pilkada serentak yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 yang diikuti oleh beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya terdapat di wilayah Buton. Buton sendiri mempunyai beberapa Kabupaten/kota yang akhir masa jabatan kepala daerah berakhir di tahun 2016 lalu. 4 Kabupaten/kota, yakni Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Buton. Salah satu Pilkada yang menarik dan syarat akan persoalan adalah Pilkada Kabupaten Buton tahun 2017. Dimana kandidat calon tunggalnya merupakan seorang yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan ketua Umum Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Adanya penolakan massa Aliansi Buton Bersatu tidak mampu meruntuhkan pertarungan antara Samsu Umar Abdul Samiun yang akrab disapa Umar Samiun bersama wakilnya Drs La Bakry dalam melawan Kotak Kosong, karena pada akhirnya kemenangan berhasil diraih oleh kubu Umar dan pasangannya, La Bakry dengan perolehan suara sebanyak 55,08% suara dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Buton. Hasil itu didapat dari *real count* sementara KPU. Dari laman resmi KPU, Kamis (16/2/2017), sudah 100 persen data yang diperoleh dari total 213 tempat pemungutan suara (TPS) Samsu dan pasangannya La Bakry, memperoleh 27.512 suara, sedangkan 22.438 suara (44,92%) untuk kotak kosong. Total suara sah sebanyak 49.959 dan total suara tidak sah 655 (Detik.com, 24 Oktober 2017). Sehingga untuk kedua kalinya pasangan ini kembali memimpin Buton untuk masa jabatan lima tahun kedepan.

Kasus hukum Bupati Buton kemudian menjadi renungan atas praktik demokrasi di Indonesia. Pencalonan seseorang di Pemilu ketika kandidat sedang dalam proses hukum atau tengah menjadi tersangka membawa persoalan baru di kemudian hari. Terutama ketika kandidat terpilih tetapi sebagai terdakwa sebagaimana kasus Bupati Buton. Kasus seperti ini melahirkan suatu ketidakjelasan dan tanda tanya besar dikepala kita, mengapa pemimpin yang tersandung kasus korupsi bisa memenangkan Pemilu. Kasus yang dialami Bupati Buton ini menunjukkan bagaimana pandangan masyarakat yang kemudian melahirkan suatu keputusan untuk memilih seorang koruptor menjadi kepala daerah. Hal ini kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai perilaku pemilih.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, dengan pertimbangan bahwa lokasi ini merupakan salah satu kecamatan terluas dengan jumlah pemilih yang cukup besar di Kabupaten Buton. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang juga dikenal sebagai metode konfirmasi karena dalam implementasinya metode ini selalu mengkonfirmasi realitas dengan berdasarkan teori yang telah diuji melalui hipotesis yang sejak awal telah dirumuskan secara *rigid*. Survei dapat digunakan dalam penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena (deskriptif), maupun penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena (eksplanatif). Bila suatu

penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, maka survei harus mampu memberikan gambaran secara umum (*universum*) tentang gejala yang diteliti. Sementara jika survei dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena, maka penelitian harus sampai pada pengujian hubungan antarvariabel, dan tidak sekadar menggambarkan karakteristik gejala tertentu dari suatu populasi sebagaimana dalam penelitian survei deskriptif (Upe, 2010).

Populasi dari penelitian yaitu seluruh pemilih di Kelurahan Pasarwajo dalam Pilkada Kabupaten Buton, yaitu sebanyak 2.498 orang (KPUD Buton, 2018). Oleh karena jumlah populasi cukup besar, maka diperlukan pemilihan sampel dengan teknik *simple random sampling* sebagaimana yang dikemukakan oleh Slovin (Upe, 2017). Adapun presisi dari penelitian ini adalah 10%, maka rumus yang digunakan yaitu:

$$N = \frac{N}{1 + N(\alpha)^2} \quad \text{Jadi jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 96 orang.}$$

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daftar pertanyaan (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015). Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup atau pernyataan tertutup dengan menggunakan skala Likert, dimana variasi jawabannya sudah ditentukan dan disusun terlebih dahulu, sehingga responden tidak mempunyai kebebasan untuk memilih jawaban kecuali yang sudah diberikan. Dokumen dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data dari instansi-instansi terkait yaitu KPUD Kecamatan Pasarwajo berupa data DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan hasil Pilkadkota Kecamatan Pasarwajo tahun 2017. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu dengan metode analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) yang diolah menggunakan SPSS for windows versi 16.0.

## **PEMBAHASAN**

### **Uji Regresi Linear Secara Bersamaan**

Uji serentak atau bersamaan dikenal juga dengan uji F atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.

### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Figur (X3), Ideologi partai (X2), Visi-misi (X1) <sup>a</sup>		. Enter

- a. All requested variables entered.  
 b. Dependent Variable: Perilaku pemilih(Y)

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.439 <sup>a</sup>	.193	.166	.61669

- a. Predictors: (Constant), Figur (X3), Ideologi partai (X2), Visi-misi (X1)

Berdasarkan output di atas diketahui nilai *R Square* sebesar 0,192, hal ini mengandung arti bahwa besarnya kontribusi pengaruh variabel X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 19,2%. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk kontribusi dari ketiga variabel X terhadap variabel Y secara simultan sangat kecil hanya sebesar 19,2%, yang berarti masih ada variabel lain yang mempengaruhi perilaku memilih di Kelurahan Pasarwajo selain ketiga variabel tersebut.

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.345	3	2.782	7.314	.000 <sup>a</sup>
	Residual	34.989	92	.380		
	Total	43.333	95			

- a. Predictors: (Constant), Figur (X3), Ideologi partai (X2), Visi-misi (X1)  
 b. Dependent Variable: Perilaku pemilih (Y)

Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui nilai signifikansi untuk X1, X2 dan X3 secara bersama terhadap Y adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai F hitung  $7,314 > F$  tabel 2,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh X1, X2 dan X3 secara bersamaan terhadap Y.

### Uji Regresi Linear Parsial

Uji parsial dikenal juga dengan uji t, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya.

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.002	.514		3.893	.000
	Visi-misi (X1)	-.082	.044	-.177	-1.845	.068
	Ideologi partai (X2)	-.219	.083	-.249	-2.637	.010
	Figur (X3)	.193	.058	.317	3.304	.001

a. Dependent Variable: Perilaku pemilih (Y)

Berdasarkan hasil uji t di atas, diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar  $0,68 > 0,05$  dan nilai t hitung  $-1,845 < 1,990$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Jadi visi-misi tidak mempunyai pengaruh terhadap perilaku pemilih. Untuk nilai ideologi partai diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar  $0,10 > 0,05$  dan nilai t hitung  $-2,637 < 1,990$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 untuk nilai ideologi partai ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Jadi nilai ideologi partai tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku pemilih. Dan untuk figur, diketahui nilai sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai t hitung  $3,304 > 1,990$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 untuk figur diterima yang berarti terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Jadi figur Umar-Bakry mempunyai pengaruh terhadap perilaku pemilih.

Berdasarkan hasil pengujian dari setiap variabel mengenai perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Buton untuk kelurahan Pasarwajo, dapat dianalisis bahwa pemilih tidak lagi mempertimbangkan visi-misi dalam memilih calon kepala daerah. Hal ini terjadi karena adanya pengalaman dimasa lalu, dimana masih banyak janji-janji pada saat kampanye yang belum terealisasikan. Sehingga masyarakat sebagai responden menilai bahwa visi-misi itu hanyalah slogan atau kata-kata gombal yang kemudian dianggapnya tidak penting. Selain itu, terkadang para pemimpin juga seolah menutup mata dalam proses pengambilan keputusan terhadap suatu kebijakan, sehingga ada sebagian program yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat tetapi justru itu yang diberikan. Sedangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak dipenuhi.

Sama halnya dengan visi-misi, nilai ideologi partai juga tidak menjadi pertimbangan dalam memilih setelah dilakukan pengujian. Hal ini boleh jadi karena tidak ada kekonsistenan pemilih yang didasarkan pada identifikasi partai politik. Berbeda dengan dua hipotesis sebelumnya, pada hasil pengujian mengenai figur Umar-Bakry, dapat dianalisis bahwa masyarakat masih memperimbangkan sosok keduanya dalam memilih.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hipotesis pertama (H1) dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara visi-misi pasangan calon Umar-Bakry terhadap perilaku pemilih di Kelurahan Pasarwajo.
2. Pada hipotesis kedua (H2) dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara nilai ideologi partai terhadap perilaku pemilih di Kelurahan Pasarwajo.
3. Pada hipotesis ketiga (H3) dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara figur Umar-Bakry terhadap perilaku pemilih di Kelurahan Pasarwajo.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti ajukan serta pengalaman peneliti selama penelitian ini dilaksanakan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat ataupun calon kepala daerah harus saling terbuka dan bersikap jujur serta harus saling mengerti hak dan kewajiban. Dalam proses memilih harus berdasarkan pertimbangan yang baik dan dari hati nurani bukan karena sesuatu hal yang lain. Karena barang siapa yang menginginkan perubahan kearah yang lebih baik maka dia harus jujur dengan dirinya sendiri. Jika kita memulai sesuatu yang baik maka pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang baik pula. Untuk itu jadilah pemilih yang objektif jangan mudah terpengaruh oleh sesuatu.
2. Bagi pemimpin bertindaklah layaknya seorang pemimpin, jangan menjadi serahkah akan kekuasaan sehingga menindas masyarakat kecil. Ingatlah akan tanggungjawab yang dipercayakan olehmu. Jangan jadikan visi-misi hanya sebatas slogan atau nyanyian pelipur lara karena masyarakat tidak selamanya mau di nina bobokan dengan semua janji-janji yang belum terealisasikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dhesinta, Wafia Silvi. 2016. *Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)*. Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Mopeng, Dwidyawati Ester. 2016. *Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara Periode 2016-2021 (Studi di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi)*. Penerbit UNSRAT.
- Mulyani, Indah. 2017. *Perilaku Pemilih Masyarakat Suku Laut di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Bupati) Tahun 2015*. Penerbit Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Pradhanawati, Ari. 2005. *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Surakarta: KOMPIP.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Upe, Ambo. 2008. *Sosiologi Politik Kontemporer*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Upe, Ambo dan Damsid. 2010. *Asas-Asas Multiple Researches: dari Norman K. Denzin hingga John W. Creswell dan Penerepannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Upe, Ambo. 2017. *Pengantar Statistika Sosial: Suatu Pengenalan Statistika Modern*. Kendari: Literacy Institute.